KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tanggapi Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Nasdem Sarankan Kolaborasi Dengan Pemda
Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1

Tanggapi Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasdem Sarankan Kolaborasi Dengan Pemda

PEMERINTAH akan menaikkan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat. Rencananya, kenaikan dilakukan tahun depan.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang saat ini berada di koalisi pemerintah berharap kenaikan itu bisa direvisi agar tidak terlalu tinggi.

Politisi Nasdem Okky Asokawati menyarankan pemerintah mencari alternatif lain sampai pada keputusan untuk menaikkan iuran. Misalnya, melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga tertentu dalam menentukan tarif jaminan kesehatan masyarakat.

"Sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ada baiknya pemerintah berikhtiar dulu agar besaran kenaikan iuran dapat lebih ditekan dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan kementerian," kata Okky dalam keterangan pers yang diterima *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Okky berpandangan, solusi menaikkan iuran saat ini masih menimbulkan keresahan masyarakat, walaupun pemerintah hanya menaikkan iuran pada peserta mandiri tingkat I, II, dan III. Dia menyarankan kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan mengkolaborasikan program yang ada dengan pemerintah daerah untuk menekan iuran.

"Banyak pemerintah daerah yang menerbitkan program kesehatan bagi warga daerahnya. Kenapa tidak, program tersebut dikolaborasikan dengan BPJS Kesehatan, jadi tidak terpisah. Dengan cara ini besaran iuran dapat ditekan dengan asumsi warga mendapat subsidi dari daerah," kata Okky.

Juru Bicara Kongres Partai Nasdem itu mencontohkan, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan kepada Pemda dengan program kesehatannya. Dari situ, diharapkan akan ada subsidi dari anggaran setiap daerah untuk menekan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Misalnya, Pemda menyubsidi iuran BPJS Kesehatan warganya Rp 10 ribu, maka sisanya masyarakat yang membayar," tambah Okky.

Menurutnya, metode ini akan menjadikan iuran setiap daerah akan beragam, tergantung dari masing-masing kemampuan daerah memberikan subsidinya.

Selain itu, Okky memberikan kritiknya kepada pejabat Kementerian Keuangan tentang masyarakat yang manja selalu berobat membuat keuangan BPJS Kesehatan terganggu. Dia berharap narasi-narasi seperti itu tidak digunakan di tengah polemik kenaikan iuran yang dianggap memberatkan.

"Pernyataan para pejabat di BPJS dan Kemenkeu ini yang menambah kegalauan masyarakat. Baiknya gunakan narasi dan argumentasi yang rasional, berpihak dan empatik. Bukan justru membuat narasi yang menambah kegelisahan publik," kata Okky.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, sampai saat ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih terus dibahas. Namun, pada rapat terakhir dengan Komisi 9 DPR bersama dengan perwakilan pemerintah dan BPJS Kesehatan, parlemen meminta perbaikan dari manajemen itu sendiri.

"BPJS dengan Komisi IX itu ya beberapa kesimpulan menyatakan ini harus hal-hal yang terkait dengan perbaikan kinerja dan manajemen yang ada di BPJS harus diperbaiki," ujar Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ketua DPP PDIP itu kemudian mengungkapkan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) tetap mendapatkan bantuan negara. Memang, dia tidak menafikkan bahwa kenaikan sangat terasa untuk peserta mandiri Kelas I dan II. Tapi menurut Puan pada tingkat tersebut kemampuan dalam mencegah sakit lebih mampu dari kelas lainnya.

"Yang pasti PBI tetap ditanggung negara walaupun kenaikan sampai dua kali. Jadi peserta 96,8 juta itu kan tetap ditanggung negara, ditanggung pemerintah. Yang kelas 1 kelas II ini kenaikannya sebagian besar dari mereka itu untuk bisa menjaga kesehatannya secara preventif," katanya. ■ MHS